

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu lembaga keuangan yang didirikan dengan kewenangan jasa penyimpanan dan peminjaman uang adalah Bank. Bank Syariah menurut UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan di Bank syariah mengimplementasikan pembiayaan yang bebas akan adanya riba. Tidak diperkenankan adanya bunga didalam transaksi pada bank syariah. Akan tetapi menggunakan skema seperti halnya jual beli, akad sewa, penanaman modal atau kombinasi dari akad-akad tersebut.

Salah satu bank syariah yang ada dikabupaten sumenep adalah Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BPRS Bhakti Sumekar. Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang BPRS Bhakti Sumekar yang akan dibahas pada penelitian ini.

BPRS Bhakti Sumekar merupakan badan usaha yang dimiliki langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumenep yang didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPRS Bhakti Sumekar mengalami beberapa proses dalam pendiriannya, mulai dari pengakuisisian pada Bank Perkreditan Rakyat yang berdomisili di Sidoarjo yaitu PT. BPR DANA MERAPI untuk kemudian direlokasi ke kabupaten Sumenep. Kemudian perubahan nama menjadi BPR Bhakti Sumekar, dan pada akhirnya menjadi BPRS Bhakti Sumekar. Aktivitas pada Bank Perkreditan Rakyat yang berdomisili di Sidoarjo yaitu PT. BPR DANA MERAPI untuk kemudian

direlokasi ke kabupaten Sumenep merupakan aktivitas berbasis Islam (Ainun, 2017).

Dalam segala bidang perusahaan modal adalah salah satu yang paling penting. Hal ini membuat tingkat keuntungan seringkali difokuskan pada pemilik modal terbesar. Dalam aspek ekonomi modal berupa asset atau materi memegang porsi terbesar dalam proses distribusi laba.

Salah satu faktor produksi dalam perusahaan adalah modal. Di dalam ajaran Islam, distribusi sebuah kesejahteraan harus diupayakan secara adil sesuai dengan besaran kontribusinya. Modal sejatinya bukan faktor utama produktivitas, ada faktor penentu lain yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk saat ini distribusi laba lebih terfokus pada kepentingan pemilik modal.

Pencapaian dalam sebuah perusahaan salah satu diantaranya yaitu laba. Proses penciptaan laba sangat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain stakeholder. Banyak kritikan dari para ilmuwan bidang akuntansi tentang konsep pendistribusian laba yang lebih terpusat pada pemilik modal saja. Hal ini menimbulkan masalah tentang proses pendistribusian laba, padahal masih banyak pihak-pihak lain yang seharusnya mendapatkan bagian dari pendistribusian laba tersebut. Seperti orang-orang sekitar yang berkecimpung dalam pelestarian lingkungan. Sedangkan sistem akuntansi syariah merupakan ajaran yang menganut ajaran islam yang menekankan pada prinsip keadilan pada semua pihak yang berkontribusi dalam proses penciptaan laba.

Di dalam kerjasama dalam bentuk syirkah ekonomi Islam mengatur tentang bagaimana perusahaan dapat mendistribusikan hasil usahanya (laba

bersih) kepada pihak-pihak yang bekerja. Masalah berkenaan dengan pendistribusian laba telah diatur dalam hukum islam sesuai dengan jasa/kedudukan penerima laba. Misalnya pemilik modal, pencari modal, pengelola modal, yang melakukan jual beli dan pendistribusi hasil produksi.

Syirkah merupakan suatu hal yang mengatur tentang hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan serta hubungan perusahaan dengan pihak-pihak lain. Syirkah juga mengandung prinsip bahwa pendistribusian laba harus dilakukan pertimbangan sebelumnya guna untuk meminimalisasi kemungkinan adanya kerugian yang nanti dialami oleh perusahaan. prinsip keadilan akan lebih dapat diciptakan apabila perusahaan menerapkan sistem akuntansi syariah, hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang diungkapkan oleh Ibnu Al-A'rabi yang dikutip Nurhayati (2009, 100) "yaitu tidak boleh melakukan transaksi syariah secara tidak adil".

Islam tidak membatasi umatnya untuk mendapatkan harta/materi. Akan tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam diantaranya: "carilah harta yang halal, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan/melampaui batas, tidak dizalimi maupun menzalimi, tidak dengan cara riba, maisir (perjudian dan *intended speculation*), dan gharar (ketidakpastian), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah". Ini perbedaan mendasar antara sistem ekonomi islam dengan perekonomian konvensional yang lebih mementingkan kepentingan pribadi (*self interest*) sebagai dasar perumusan konsepnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul *“Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan”*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut.

- 1.2.1 Bagaimanakah pendistribusian laba dalam BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?
- 1.2.2 Apakah pendistribusian laba yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep telah adil bagi para stakeholder?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian laba dalam BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- 1.3.2 Untuk mengetahui apakah pendistribusian laba yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep telah adil bagi para stakeholder.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Kontribusi Praktis**

memberikan sumbangan pemikiran dalam pengambilan keputusan, terutama menyangkut tentang pendistribusian laba yang berperan penting dalam pembagian laba kepada stakeholder.

#### **1.4.2 Kontribusi Teoritis**

Hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian terhadap pendistribusian laba kepada stakeholder diperbankan syariah untuk terciptanya prinsip keadilan.

#### **1.5 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitimembatasi pada pendistribusian laba BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang menerapkan prinsip syariah dan juga apakah penditribusian labanya telah adil bagi para stakeholder pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang menerapkan prinsip syariah.

